

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Amerika Serikat pada saat sekarang ini dapat dilihat sebagai negara yang relatif intervansionis dan sangat berambisius dalam upaya mencapai tujuan politik luar negerinya dalam berbagai bidang baik dari segi ekonomi maupun militer. Siapa yang dapat menyangka negara yang sangat intervansionis ini dulunya merupakan negara yang menerapkan politik isolasionis dari abad 18 sampai awal abad ke 20. Amerika Serikat mengambil langkah politik isolasionis ini dalam rangka ketidakinginannya dalam mencampuri atau mengintervensi urusan negara lain. Namun sepertinya politik luar negeri yang diterapkan para bapak pendiri Amerika Serikat tersebut tidak memadai untuk diterapkan lagi dalam situasi dan kondisi perubahan politik dunia, dimana Amerika Serikat terpaksa terlibat dalam Perang Dunia I dan perang Dunia II yang kemudian mengubah arah kebijakan politik Luar Negeri Amerika Serikat secara tajam dari politik isolasionis menjadi politik luar negeri yang cenderung agresif.¹

Perubahan politik dunia pasca Perang Dunia I dan II nampaknya menyisakan dunia menjadi dua kekuatan besar, dua kekuatan tersebut adalah Amerika Serikat dan sekutunya yang kemudian hari dikenal sebagai Block Barat dan Uni Soviet serta sekutunya Block Timur. Seiring berjalannya waktu dua kekuatan tersebut menaruh rasa saling tidak percaya satu sama lain karena dua kekuatan tersebut memiliki pandangan yang berbeda terhadap sistem

¹ Bambang Cipto, *Politik dan pemerintahan Amerika Serikat*, Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2007, hal.197.

pemerintahan dan ekonominya. Sehingga munculah rasa kecurigaan dari dua kekuatan tersebut. Kecurigaan itu mengarah kepada Amerika Serikat yang ingin menyebarkan ideologinya begitu pula dengan Uni Soviet (Amerika Serikat dengan sistem Liberalis-Kapitalis dan Uni Soviet Sosialis-Komunis) yang kemudian menjadi pemicu pecahnya Perang Dingin.

Perang Dingin sejatinya merupakan perang urat saraf karena perang ini tidak seperti Perang Dunia I dan Perang Dunia II yang merupakan perang fisik antara negara – negara yang berseteru. Perang ini lebih dikenal sebagai perang ideologi. Dimana dua kekuatan tersebut berupaya menyebarkan ideologi mereka masing – masing kepada negara lain dan strategi yang digunakan juga berbeda-beda. Di Eropa Amerika Serikat menerapkan politik pembendungan dengan apa yang dikenal sebagai “Doktrin Truman” yang menjadi awal dari politik pembendungan Amerika Serikat.² selain itu Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan *Marshall Plan* yang dikenal sebagai *Economic Recovery Act (ERA)* merupakan bantuan uang sebesar US\$ 12 miliar dalam bentuk tunai³ yang diberikan kepada negara-negara Eropa sebagai bentuk pemulihan Eropa karena pada saat itu Amerika Serikat memandang Eropa sebagai kekuatan terbesar dalam menghadapi penyebaran Komunis Uni Soviet. Hal ini dianggap karena Eropa memiliki kekuatan potensial seperti sumber daya manusia, Industri, produktifitas, ilmu pengetahuan serta mesin.⁴ Apabila kekuatan-kekuatan tersebut jatuh ketangan Uni Soviet sangat jelas ini akan mengancam Amerika Serikat. Maka dari

²*Ibid*, hal. 198.

³Robert A.Liston, *The United State and The Soviet Union A Background Book on The Struggle for Power*, New York: Parent’s Magazine Press, 1973, hal. 140.

⁴ John Spanier, *American Foreign Policy Since WW II*, Washington,D.C: Congressional Quarter Inc, 1988, hal. 48.

itu perlu adanya pembendungan paham komunis di Eropa. Dengan memberikan bantuan tersebut maka Eropa akan berpihak kepada Amerika Serikat dalam hal ini Amerika Serikat juga mendapatkan kepercayaan dari Eropa. Kemudian Amerika Serikat dan Eropa Barat membentuk NATO untuk melindungi kebijakan *Marshall Plan*. Selain itu NATO juga dibentuk sebagai perlindungan bagi negara-negara Eropa Barat yang merupakan sekutu Amerika Serikat dalam menahan serangan komunis oleh Uni Soviet.⁵

Sukses dengan politik pembendungan di Eropa, Amerika Serikat juga menerapkan kebijakan tersebut di Asia dalam menghadapi komunis Tiongkok. Untuk itu dalam membendung kekuatan komunis di Asia, Amerika Serikat memberikan dukungan terhadap kaum Nasionalis Kuomintang dan adanya keterlibatan Amerika Serikat di Korea. Namun usaha ini banyak mengalami kegagalan sehingga muncullah gagasan tentang perlunya kekuatan militer dan investasi besar terutama di bidang militer seperti kapal selam, kapal induk, senjata konvensional dan nuklir serta pemeliharaan lebih dari 100.000 pasukan Amerika Serikat di Asia yang sebagian besar berbasis di Jepang dan Korea.⁶ Amerika Serikat dan Jepang meningkatkan intensitas perjanjian militernya, perjanjian bilateral antara Amerika Serikat menjadi penting karena Amerika Serikat dapat menahan penyebaran komunis di Asia Tenggara khususnya Tiongkok.

Sepertinya Perang Dingin yang terjadi selama kurang lebih dari 44 tahun menyebabkan kekuatan Uni Soviet mulai mengalami penurunan yang dapat

⁵ *Ibid*, hal. 199.

⁶http://mahritafisip12.web.unair.ac.id/artikel_detail97832geopolitik%20dan%20geostrategiKepentingan%20dan%20Pengaruh%20Amerika%20Serikat%20di%20Kawasan%20Asia%20Timur%20selama%20dan%20Pasca%20Perang%20Dingin.html. Diakses pada tanggal 17-9-2014 pukul 19:45 wib.

terlihat dalam beberapa masalah domestiknya. Seperti terjadinya stagnasi dibidang ekonomi, partai dan pemerintahan serta terjadinya kebekuan dalam aparaturnegara. Pada pertengahan tahun 1970-an terjadi krisis moral yang melanda Uni Soviet dan kemerosotan cita-cita revolusioner dan juga nilai-nilai Sosialis sehingga mengakibatkan berkembangnya sikap benalu dalam diri masyarakat yang menghancurkan produktivitas kerja yang mengakibatkan munculnya kelembaman pembangunan ekonomi yang hanya mengunggulkan kuantitas namun mengesampingkan kualitas.⁷

Beberapa masalah dalam negeri tersebut menyebabkan situasi pemerintahan Uni Soviet berada diujung tanduk yang dimulai dengan lepasnya 15 wilayah Uni Soviet yang kemudian disusul dengan mundurnya pemimpin Uni Soviet Mickhail Gorbachev pada tanggal 24 Desember 1991 yang kemudian menandai runtuhnya pemerintahan Uni Soviet. Seiring dengan runtuhnya Uni Soviet isu tentang pembendungan ideologi telah berakhir dengan menyisakan Amerika Serikat sebagai satu-satunya negara *Super Power* di dunia.

Berakhirnya Perang Dingin membawa perubahan terhadap Politik Luar Negeri Amerika Serikat, ini dapat dilihat dari beberapa kerjasama Amerika Serikat yang lebih mengutamakan pembangunan militer dan meningkatkan kerjasama Ekonomi di Kawasan Asia Pasifik. Hal ini dapat dibuktikan dengan revitalisasi pembangunan pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa-Jepang yang sebelumnya sempat mengalami perdebatan tentang perlunya mempertahankan Pangkalan militer Amerika Serikat di Okinawa-Jepang. Dalam

⁷ Bambang Sunaryono, *Power Point Rusia*, Yogyakarta: Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2014.

kunjungan Presiden Amerika Serikat Barack Obama ke Jepang, dia meminta Jepang agar membangun kekuatannya. Meskipun hal ini bertentangan dengan Konstitusi Jepang pasal 9 yang intinya merupakan Jepang tidak diperbolehkan mengembangkan kekuatannya. Namun, Barack Obama meminta Perdana Menteri Jepang yaitu Shinzo Abe agar mengkaji ulang pasal 9 tersebut.

Pada tahun 2006 Amerika Serikat dan Jepang sepakat dalam membangun aliansi mereka termasuk membangun pangkalan militer di Guam yang memakan biaya US\$ 10,3 miliar dengan kontribusi Jepang sebesar 60%. Tujuannya adalah membangun pangkalan militer di Guam pada tahun 2010 dan mengalokasikan 8000 marinir dari Okinawa ke Guam pada tahun 2014.⁸ Selain memperkuat aliansi dengan Jepang, Amerika Serikat juga membangun kerjasama *EDCA (The Enhanced Defense Cooperation Agreement)* dengan pihak Manila yang disahkan pada tanggal 28 April,⁹ yang berarti bahwa Amerika Serikat merevitalisasi pangkalan militernya di Filipina. Pangkalan militer lainnya terdapat di Korea Selatan yang dibangun pada era Perang Dingin agar dapat menahan serangan komunis Korea Utara.

Selain itu pangkalan militer lainnya berada di Malaysia-Malaka, Singapore, Darwin-Australia dan yang masih dalam tahap pembangunan sekarang adalah di Perth - Australia. Barack Obama beranggapan bahwa perlunya

⁸ Shirley A. Kan, *Guam: U.S. Defense Deployments*, June 9, 2014.

⁹<http://www.globalresearch.ca/the-encirclement-of-china-new-us-military-bases-in-the-philippines/5382666>. Diakses pada tanggal 23-9-14 pukul 10:24.

menambah pangkalan militernya di Australia dalam meningkatkan stabilitas di kawasan Asia Pasifik.

Poros militer Amerika Serikat yang terdapat di Asia tersebut menurut sebagian pengamat yang salah satu nya adalah Robert D. Kaplan. Ia beranggapan bahwa ancaman terhadap Amerika Serikat pasca Perang Dingin adalah Tiongkok.¹⁰ Maka dari itu diperlukan strategi untuk membendung kekuatan Tiongkok dengan cara yang berbeda dari sebelumnya dimana pada saat Perang Dingin Amerika Serikat menggunakan strategi “*Marshall Plan* dan Doktrin Truman” (*Dollar Diplomacy*). Sedangkan saat ini Kebijakan itu berubah dari *Dollar Diplomacy* menjadi *Coersive Diplomacy* dimana kebijakan keamanan itu berbentuk pada perlunya mendirikan pangkalan-pangkalan militernya di Asia Pasifik. Amerika Serikat juga mengajak negara – negara di Asia Pasifik untuk membangun kerja sama ekonomi dalam menciptakan stabilitas kawasan di wilayah tersebut. Hal ini dibuktikan dengan kunjungan Barack Obama kenegara-negara di kawasan Asia Pasifik diawal pemerintahannya dan merupakan fokus utama politik luar negeri Amerika Serikat di masa pemerintahan Barack Obama.

¹⁰RobertD.Kaplan, “*How we would Fight China*”, sumber; <http://www.theatlantic.com/magazine/archive/2005/06/how-we-would-fight-china/303959/> diakses pada tanggal 3 september 2014.

B. Rumusan Masalah

Melihat perbedaan strategi politik pembendungan Amerika Serikat dalam mempertahankan legitimasinya sebagai negara *Super Power* di dunia menimbulkan pertanyaan dan menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini. Untuk itu *research question* yang digunakan adalah: “Mengapa terjadi perubahan strategi kebijakan politik pembendungan Amerika Serikat terhadap Tiongkok?”

C. Kerangka Pemikiran

Untuk membahas lebih dalam dan memperoleh gambaran sistematis dan eksplanasi tentang permasalahan yang telah dipaparkan penulis menggunakan konsep Kebijakan Luar Negeri dan Kepentingan Nasional.

1. Kebijakan Luar Negeri

Untuk dapat mencapai tujuannya dalam dunia internasional, sebuah negara harus berinteraksi dengan negara lain. Interaksi tersebut dapat berupa hubungan kerjasama atau berupa konflik. Berikut ini adalah pengertian Politik Luar Negeri, menurut Jack C. Plano dan Roy Olton:

“Foreign policy is a strategy or planned course or action developed by the decision makers of a state vis a vis other states or international entities, aimed at achieving specific goals defined in term of national interest.”

A specific foreign policy carried on by a state maybe the result of an initiative by that state or may be a reaction to initiative undertaken by other state”¹¹

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, politik luar negeri adalah sebuah strategi atau tindakan terencana yang dibuat oleh para pembuat keputusan suatu negara dalam menghadapi negara lain atau unit politik internasional yang lain untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya. Sebuah tindakan yang dilakukan oleh suatu negara bisa dilatar belakangi oleh inisiatif negara itu sendiri atau bisa juga sebagai reaksi atas tindakan yang telah dilakukan oleh negara lain dimana tindakan negara lain tersebut memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasionalnya.

Sementara itu menurut Rosenau, pengertian politik luar negeri adalah upaya suatu negara melalui keseluruhan sikap dan aktivitasnya untuk mengatasi dan memperoleh keuntungan dari lingkungan eksternalnya.¹²

Dengan demikian dapat kita mengerti bahwa politik luar negeri adalah suatu komitmen berupa sikap, atau tindakan, yang dilakukan oleh satu negara terhadap lingkungan eksternalnya, dalam upaya mencapai tujuan tertentu. Komitmen tersebut bisa lahir atas inisiatif negara itu sendiri atau bisa pula lahir untuk menanggapi permasalahan yang terjadi pada lingkungan eksternalnya dimana lingkungan eksternal tersebut memiliki pengaruh atas tujuan yang ingin ia capai. Tujuan-tujuan tersebut merupakan kebutuhan vital yang ada dalam terminologi kepentingan nasional.

¹¹ Jack C. Plano and Roy Olton, *International Relations Dictionary*, USA:Rinehart and Wingston Inc, 1969, hal 127.

¹² James N. Rosenau, Gavin Boyd, Kenneth W. Thompson, ‘*World Politics: An Introduction*, New York: The Free Press, 1976, hal. 27.

2. Kepentingan Nasional

Konsep kepentingan nasional adalah konsep yang dikenal secara luas oleh para penstudi ilmu hubungan internasional dan sering digunakan sebagai alat untuk menganalisa fenomena dan perilaku unit politik dalam interaksinya di dunia internasional.

Jack C. Plano dan Roy Olton mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

*The fundamental objective and ultimate determinant that guides the decision makers of a state in making foreign policy. The national interest of a state is typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state's most vital needs. These include self-preservation, independence, territorial integrity, military security, and economic well-being.*¹³

Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton, kepentingan nasional adalah faktor utama yang memandu perilaku sebuah negara terhadap lingkungan eksternalnya. Setiap sikap atau tindakan yang diambil didasarkan pada apa kebutuhan negara itu sendiri. Setidaknya ada lima kebutuhan vital yang dapat menyebabkan sebuah negara mengambil sebuah perilaku terhadap lingkungan eksternalnya yakni:

1. Pertahanan diri, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keberadaan, identitas, serta nilai-nilai yang dimiliki agar ia terbebas dari pengaruh yang timbul atas keberadaan, dan nilai-nilai yang dimiliki oleh negara lain.
2. Kemerdekaan, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memiliki negara yang sepenuhnya berdaulat, serta pemerintahan yang dalam menjalankannya ia tidak takluk dan tunduk kepada negara lain.

¹³ Jack C. Plano and Roy Olton, *Op Cit*, hal. 128.

3. Keutuhan wilayah, yakni faktor yang meliputi kebutuhan untuk memelihara keutuhan wilayah nasionalnya.
4. Keamanan militer, yakni kebutuhan untuk memelihara kekuatan militernya dan menjaga agar tidak ada kekuatan militer lain yang dapat mengancam keamanannya.
5. Kesejahteraan ekonomi, yaitu kebutuhan untuk dapat meningkatkan kemampuan, pendapatan, dan kesejahteraan di bidang ekonomi bagi negara dan rakyatnya.

Tindakan Amerika Serikat yang mengubah kebijakan politik luar negerinya di Tiongkok mencerminkan kepentingan nasional Amerika Serikat untuk mencapai tujuan dalam negerinya yang dilatar belakangi oleh inisiatif Amerika Serikat sebagai reaksi atas kebangkitan ekonomi dan militer Tiongkok dimana kebangkitan tersebut memiliki pengaruh terhadap kepentingan nasional Amerika Serikat. Untuk itu Amerika Serikat berusaha menjaga kepentingan ekonominya agar tetap menjadi hagemoni dunia.

Pendirian pangkalan militer Amerika Serikat mengelilingi Tiongkok sebagai sebuah politik luar negeri Amerika Serikat yakni sebagai sebuah kebutuhan untuk memelihara kekuatan militernya dan menjaga agar tidak ada kekuatan militer lain yang dapat mengancam keamanannya dan untuk menciptakan stabilitas kawasan di Asia Pasifik . Hal ini dilakukan guna menjaga kepentingan nasional Amerika Serikat yaitu mengamankan kekuatan dan aliansinya di negara-negara asia pasifik sehingga pengaruhnya tetap terjaga dikawasan tersebut.

Munculnya Tiongkok sebagai sebuah kekuatan yang mengalami kemajuan pesat dibidang Ekonomi yang kemudian disusul dengan kemajuan militernya menimbulkan kekhawatiran bagi Amerika Serikat dimana kekhawatiran itu berupa Tiongkok akan menggeser kedudukan Amerika Serikat sebagai negara *super power* di dunia. Pemerintah Amerika Serikat sendiri juga memperhatikan perkembangan Tiongkok dan memberikan perhatian terhadap kemajuan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan militernya. Dalam laporan *Quadrennial Defence Review Report* melaporkan bahwa Tiongkok mempunyai potensi untuk menjadi competitor militer Amerika Serikat dengan modernisasi dan peningkatan kapabilitasnya.¹⁴

D. Hipotesis

Dari pokok permasalahan yang dikemukakan diatas serta dengan menggunakan kerangka pemikiran teoritis yang dipakai maka penulis mengajukan hipotesa sebagai berikut: Perubahan strategi kebijakan politik pembendungan Amerika Serikat terjadi karena Amerika Serikat merasa terancam oleh kemajuan Ekonomi dan Militer Tiongkok.

¹⁴ “*Hegemoni AS dan Kerjasama Pertahanan dengan Negara Negara di Asia Timur*”, Sumber; <http://lib.ui.ac.id/file?file=digital/123687-T%2026253-Strategi%20Militer-Tinjauan%20Literatur.pdf> diakses pada tanggal 22 oktober 2014.

E. Jangkauan Penelitian

Untuk membatasi penelitian dalam skripsi ini agar terfokus dan tepat sasaran dalam menganalisa tulisan ini, penulis memfokuskan pembahasan tentang orientasi politik luar negeri Amerika Serikat dan pandangan Amerika Serikat terhadap kemajuan ekonomi dan militer Tiongkok.

F. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang dapat penulis sampaikan dalam penulisan ilmiah ini adalah: Menjelaskan perubahan strategi politik pembendungan Amerika Serikat, yang semula ancaman yang berupa penyebaran Ideologi Komunis dan beralih terhadap ancaman Ekonomi dan Militer oleh Tiongkok.

G. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam proses skripsi ini adalah metode deskripsi analitik, dengan mengumpulkan data dan fakta, kemudian berdasarkan kerangka teori disusun secara sistematis sehingga dapat memperlihatkan korelasi antara fakta yang satu dengan yang lainnya. Metode ini ditunjang *library research* yang menggunakan sumber data dari literatur, artikel-artikel, jurnal, situs internet, surat kabar, dan majalah-majalah.

H. Sistematika Penulisan

BAB I. PENDAHULUAN : Merupakan pendahuluan yang di dalamnya diuraikan mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, landasan teori, hipotesa, jangkauan penelitian, tujuan penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penelitian.

BAB II. Akan menjelaskan tentang dinamika kebijakan politik luar negeri Amerika Serikat. Di bab ini merupakan penjelasan tentang arah dan pola kebijakan Amerika Serikat saat Perang Dingin dan pasca Perang Dingin serta menunjukkan adanya perubahan kebijakan luar negeri Amerika Serikat.

BAB III. Akan membahas tentang kemajuan Tiongkok dalam bidang ekonomi dan militer, serta ancaman ekonomi dan militer Tiongkok terhadap Amerika Serikat.

BAB IV. Merupakan kesimpulan dari penelitian skripsi ini.